

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Untuk mendukung penyelenggaraan ini otonomi daerah tersebut memerlukan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Menurut Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pegawai pemerintah di Indonesia, banyaknya kasus penyimpangan yang ditemukan, menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Untuk

mengembalikan dan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, tentunya diperlukan perubahan di segala bidang, yang tentunya bisa memperbaiki kualitas kinerja pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas kinerja diperlukan sebagai pertanggung jawaban terhadap kinerja. Hasil kerja dari pegawai pemerintah dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas dari masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri jabatan Kepala Pemerintah.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi menyebabkan banyaknya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah mengenai tata kelola pemerintah yang baik, hal ini disebut dengan istilah good governance. Konsep good governance ini memiliki pengaruh dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan kinerja pegawai pemerintahan. Oleh karena itu respon terhadap good governance ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup concern mengenai hal ini. Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari

salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Kusmayadi, 2009).

Untuk melaksanakan dan membangun prinsip tata kelola pemerintah yang baik tidak mudah. Ini memerlukan waktu yang lama dan usaha yang terus menerus. Selain itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme besar dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memelihara solidaritas untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Good governance sebagai sistem yang diterapkan pada pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem pemerintahan ini muncul di era reformasi karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era orde baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden. (Heriyanto:2015) mengemukakan dalam skripsi (Pertiwi, Siti Hardianti Darma:2017) bahwa good governance sebagai bagian dari agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Penerapan Good Governance dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun

adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan kedalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Salah satu bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Puspitasari, 2013).

Dari masalah yang terjadi tersebut, penyimpangan- penyimpangan terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah daerah dan dinas Kabupaten kupang yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang belum maksimal dan pemerintah daerah kabupaten kupang belum optimal dalam melakukan akuntabilitas kinerjanya terhadap publik, sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten kupang yang masih harus diperbaiki.

Berdasarkan konsep pemikiran yang tertuang dalam latar belakang, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui **“Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka persoalan penelitian yaitu Apakah Good Governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten kupang?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Good Governance terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten kupang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh Good Governance terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten kupang.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kerangka acuan bagi pihak pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kinerja pemerintah daerah kabupaten kupang.